

TAJUK RENCANA

Penanganan Sampah Saat Nataru

SAMPAH menjadi persoalan serius selama libur Natal dan Tahun Baru, terutama di kawasan Tugu, Malioboro hingga Kraton Yogyakarta (Gumaton). Wisatawan yang memadati Gumaton potensial membuang sampah di kawasan tersebut. Produksi sampah dipastikan meningkat seiring membludaknya jumlah wisatawan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah mengantisipasi kondisi tersebut, antara lain dengan menambah jumlah petugas kebersihan serta menanam-bah jam kerja. Ini adalah cara paling realistis untuk mengantisipasi meningkatkan produksi sampah di kawasan Gumaton. Pada hari-hari biasa saja, produksi sampai bisa mencapai 1,5 hingga 2 ton setiap hari (KR 27/12). Nah, apalagi selama libur Nataru volume sampah bisa meningkat dua kali lipat atau lebih.

Pj Walikota Yogyakarta yang juga Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo mengatakan, untuk mengatasi masalah sampah di Kota Yogya tak cukup hanya mengandalkan Pemkot Yogya, melainkan juga butuh partisipasi masyarakat, termasuk wisatawan. Wisatawan yang datang ke Yogya diharapkan berpartisipasi ikut menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Terutama di saat malam tahun baru, berdasar pengalaman tahun lalu, sampah berserakan di mana-mana.

Aparat Satpol PP yang bertugas menegakkan Perda nampaknya juga kewalahan kalau harus mengawasi satu persatu pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Padahal sudah jelas, membuang sampah sembarangan dapat dijerat tindak pidana ringan (tipiring), bahkan sebagian telah disidang di pengadilan negeri

dan dikenai sanksi denda.

Secara normatif sebenarnya tidak ada pengecualian terhadap pelanggaran, yakni mereka yang membuang sampah sembarangan, termasuk wisatawan. Prinsipnya, bila mereka membuang sampah sembarangan tetap dapat dikenai sanksi sesuai Perda. Tak hanya itu, mereka yang merokok di kawasan tanpa rokok (KTR) juga dapat dijerat sanksi. Namun, dalam praktiknya petugas terlebih dulu menggunakan cara persuasif, yakni dengan menegur agar wisatawan menaati aturan.

Ini berbeda dengan warga yang telah lama menetap di Yogya, mereka dianggap sudah paham aturan, antara lain tidak membuang sampah sembarangan. Mereka yang kedapatan membuang sampah sembarangan, misalnya di pinggir jalan atau di pinggir sungai, langsung diproses hukum dan kasusnya dibawa ke pengadilan, tanpa ada peringatan. Padahal, akar persoalannya, karena tempat pembuangan sampah atau depot tutup, sehingga mereka kucing-kucingan dengan petugas untuk membuang sampah di sembarang tempat.

Kita sepakat penanganan persampahan di Kota Yogya khususnya harus komprehensif, tidak bersifat parsial dan temporer. Persoalan serius persampahan di Kota Yogya, tak hanya sebatas saat libur Nataru, tapi juga pada hari-hari biasa. Kita juga sepakat Pemkot mendorong kesadaran masyarakat untuk mengolah sampahnya sendiri, tapi di sisi lain kita juga ingin pemerintah menggunakan teknologi modern untuk mengolah sampah berskala besar seperti daerah lain. Untuk itu butuh sinergi antara Pemkot dengan swasta, serta perguruan tinggi di DIY untuk mengatasi problem sampah saat ini. □-d

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

 pikiranpembaca@gmail.com  **0895-6394-11000**

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Yogya Macet, Salut PT KAI

MUNCUL informasi macetnya lalu lintas di Yogyakarta, sempat menghentikan 'luar biasa' sejumlah kereta api jarak jauh. Dalam medsos diinfokan, kereta api tersebut berhenti di Stasiun Lempuyangan. Rekayasa yang dibuat sebagai kebijakan PT KAI lewat Daop 6 Yogyakarta itu adalah untuk memberi pelayanan maksimal kepada pelanggan KA yang perjalanannya terjebak kemacetan di sekitar Stasiun Tugu Yogya-

karta mulai Jl Margoutomo.

Pemberitaan media itu tentu saja membuat apresiasi kepada PT KAI semakin tinggi. Meski tentu saja, warga masyarakat juga harus tetap bersikap tertib dan disiplin. Artinya, jangan menuju ke Stasiun mepet waktu. PT KAI sudah memberikan toleransi. Maka warga masyarakat juga harus mengapresiasi dengan disiplin. □-d

**) Adam ST, Nganggrung Jl Kaliurang KM 13,5 Sleman*

Perjalanan Yogya - Solo Luar Biasa Padat

YOGYAKARTA dan Surakarta, memang berasal dari satu keluarga : Kerajaan Mataram. Meski kemudian terbelah karena Perjanjian Giyanti, namun bagi orang Jawa khususnya, keduanya masih menjadi panutan terutama dalam budaya Jawa. Apalagi sekarang, dalam rentang wilayah Yogya - Solo juga cukup banyak tempat-tempat indah untuk wisata kuliner maupun wisata budaya.

Itulah sebab dalam liburan Nataru ini, lalu lintas Yogya - Solo juga menjadi sangat luar biasa padat. Bahkan perjalanan yang dilalui bisa duakali lipat waktunya dari perjalanan pada hari biasa. Senin (25/12) lalu, kami menjalaninya perjalanan Yogya - Solo dalam rentang waktu 4 jam. Ini mungkin masih belum apa-apa. □-d

**) Dr Didin, Banjarsasi Surakarta*

Gerak Ekonomi di Tahun Politik

PEMILIHAN Umum (pemilu) 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan pemilihan umum anggota legislatif DPR RI, DPD, dan DPRD di seluruh Indonesia. Sementara pemilihan umum kepala daerah baru akan dilaksanakan beberapa bulan kemudian. Proses Pilpres dan Pileg 2024 dimulai 14 Oktober 2022 dan berakhir 20 Oktober 2024 saat pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana dampak perhelatan politik tersebut terhadap pergerakan ekonomi?

Perhelatan politik tersebut harus berlangsung dengan kondisi politik yang aman, stabil, dan tidak menimbulkan kekacauan politik. Hal ini penting! Karena kestabilan politik merupakan syarat mutlak bagi pergerakan ekonomi di daerah dan nasional. Walt Witman Rostow berpesan dalam teori pembangunannya, bahwa untuk dapat menjalankan berbagai program pembangunan, dibutuhkan 3 syarat utama : net investasi minimal 10%, adanya *leading sector*, dan kondisi politik yang stabil. Tanpa politik yang stabil, pembangunan tidak mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Relatif Stabil

Pergerakan ekonomi sejak awal tahun 2023 relatif stabil dan menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Lembaga pemeringkat Fitch kembali mempertahankan *sovereign credit rating* Republik Indonesia (RI) pada BBB (satu tingkat di atas level terendah, *investment grade* dengan outlook stabil pada 1 September 2023.

Lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P) mempertahankan *Sovereign Credit Rating* RI pada BBB dengan outlookstabil pada 4 Juli 2023. Keputusan ini memprtimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi yang solid, rekam jejak kebijakan yang baik, dan konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari

Rudy Badrudin

target awal. Outlook yang stabil mencerminkan keyakinan Fitch dan S&P terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia untuk dua tahun ke depan, yang akan mendukung kinerja fiskal dan stabilisasi utang.

Perhelatan politik berdampak terhadap pergerakan ekonomi. Menurut



Badan Kebijakan Fiskal (2023), dana perhelatan pemilu sebesar Rp 11,52 triliun pada 2023 dan Rp 15,87 triliun pada 2024 yang utamanya dianggarkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan berdampak langsung dan tidak langsung.

Konsumsi Pemerintah

Dampak langsung berupa meningkatnya konsumsi pemerintah dan dampak tak langsung yakni konsumsi masyarakat. Konsumsi pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan naik 0,75% di 2023 dan 1% di 2024. Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga

diproyeksi naik 4,72% di 2023 dan 6,57% di 2024 sebagai dampak dari pengeluaran calon legislatif (caleg).

Angka tersebut berdasarkan perhitungan kasar dari asumsi pengeluaran caleg DPR sebesar Rp 1 miliar per orang dan caleg DPRD di kisaran Rp 200 juta. Dengan perkiraan total caleg sebanyak 8.037 untuk memperebutkan 500 kursi DPR RI, 12.372 kursi DPRD Tingkat I, dan 17.510 kursi DPRD Tingkat II.

Dampak tak langsung ke konsumsi masyarakat sekitar 0,14% di 2023 dan 0,21% di 2024. Tambahan PDB-nya pada tahun 2023 sekitar 0,2% dan pada tahun 2024 sebesar 0,27%.

Pemenang pilpres 2024 tidak perlu jemawa. Proses berkonsolidasi sangat didukung, sedang yang kalah dapat mengajukan ke jalur hukum apabila dimiliki bukti-bukti hukum yang menunjukkan kecurangan. Pilihan menjadi oposisi dapat menjadi kontrol terhadap proses pembangunan yang dijalankan. Kecenderungan dalam beberapa pemilu terakhir menunjukkan bahwa perhelatan politik di Indonesia tidak menimbulkan instabilitas politik seperti di berbagai negara. Karena di Indonesia pascaperhelatan politik para elite politik cenderung memilih berkonsolidasi. Sehingga menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk pembangunan. □-d

**) Dr Rudy Badrudin MSi, Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Melawan Korupsi dengan Budaya

Kuwi apa kuwi e kembang melathi , Sing tak puja-puji, aja dha korupsi . Merga yen korupsi, negarane rugi, Piye Mas, piye... aja ngono, ngono-ngono kuwi'

PENG GALAN syair lagu dolanan Jawa ciptaan Ki Tjokrowasito tahun 1970-an, pujangga karawitan dari Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Judul lagunya 'Kuwi Apa Kuwi'. Lagu ini termasuk gending dolanan yang sigrak dalam bentuk *gendhing lancaran pathet pelog barang*. Syair-syair sederhana dan lugas tersebut ternyata mengandung pesan moral yang relevan dengan masalah korupsi. Pesan moral Ki Tjokrowasito terkesan disampaikan dengan gaya '*guyon mari kena'*, *guyonan* satire khas Yogyakarta.

Korupsi Merajalela?

Mahfud MD, dalam berbagai talkshow di televisi maupun dalam ceramah-ceramahnya tegas mengatakan, bahwa setelah reformasi 1998, korupsi justru semakin merajalela. Tentu kita masih ingat, dalam mendengar pendapat di DPR RI, Menkopolkum tersebut mengungkapkan dana Rp 350 T ñ Rp 400 T yang bermasalah hukum. Perdebatan sengit Mhfud MD dengan para anggota DPR pun terjadi dan menjadi tontonan publik lewat TV swasta. Lewat medsos banyak netizen mengapresiasi Mahfud MD atas keberaniannya mengungkapkan dana 350-400 T tersebut.

Pada intinya, korupsi terjadi merata di berbagai lembaga penyelenggara negara. Lembaga-lembaga eksekutif di kementerian, di legislatif, dan bahkan di lembaga-lembaga yudikatif pun juga terjadi kasus-kasus korupsi. Di tingkat daerah sudah berapa gubernur, walikota, dan bupati yang tersandung perkara-perkara korupsi, baik yang sudah berketetapan hukum maupun yang

Sumaryono

sedang dalam proses peradilan. Di lingkungan eksekutif biasanya terkait suap-menyuap, misalnya kasus mantan Menkominfo dan Mentan. Di lembaga yudikatif biasanya berhubungan jual-beli perkara.

Sementara kasus-kasus gubernur, bupati, walikota menyangkut suap-menyuap dana pembangunan dan jual-beli jabatan. Adapun di lembaga perpajakan korupsi begitu massif antara petugas pajak dengan wajib pajak. Ada dugaan bahwa para petugas pajak juga sekaligus sebagai tenaga jasa pembuatan laporan pajak untuk wajib pajak untuk mempering pembayaran pajak. Sudah tentu si tenaga jasa pelaporan pajak itu tidak gratis, dan di sanalah muncul soal-soal gratifikasi yang berdampak pada peningkatan kekayaan si jasa pelaporan pajak di luar kawajaran sebagai ASN.

Zaman Edan

Dalam obrolan-obrolan di warung angkringan sering saya mendengar komentar-komentar bahwa korupsi di Indonesia itu sudah gila-gilaan, atau 'wis edan-edanan'. Ungkapan *edan-edanan* mengingatkan juga pesan moral pujangga Surakarta Ronggowarsito melalui tembang Sinom: *!Amenangi jaman edan, / / Ewuh aya ing pambudi / / Melu edan nora tahan / / Yen tan melu anglakoni, " Boya kadumen melik, Kaliren wekasanipun, "Ndilalah karsa Allah, / / Begja-begjane kang lali, / / Luwih begja kang eling lan waspada!*

Apakah ungkapan Ronggowarsito tentang 'zaman edan' tersebut sedang terjadi di era reformasi ini?

Inilah tantangan bagi para pejabat, anggota legislatif, aparat hukum, dan pengusaha. Ronggowarsito mengibaratkan zaman edan ketika para pemimpin memang dihadapkan pada persoalan keteguhan kepribadian dan kejujuran. Kalau mengikuti tindak yang gila-gilaan sebenarnya tidak tahan. Tetapi kalau tidak ikut-ikutan (korupsi) ya tidak akan sebagian harta. Namun Ronggowarsito tetap berpegang teguh pada kehendak Tuhan bahwa orang-orang yang beruntung karena kelupaan, maka tetap saja lebih beruntung bagi orang yang selalu 'ingat' dan 'waspada' dalam kehidupannya.

Khusus lagu 'Kuwi Apa Kuwii, mungkin perlu direkam dan diputar di kantor-kantor pemerintah setiap jam 10.00 seusaai lagu kebangsaan 'Indonesia Raya'. Agar pesan moral anti korupsi terus disuarakan. □-d

**) Dr Sumaryono MA, pemerhati seni, dan sosial-budaya.*

Pojok KR

Penumpang KA naik 42 persen, Jakarta-Yogya favorit.
-- Yogya jadi tujuan utama, tak tertandingi.

TPS lintas daerah tak bisa memilih caleg.
-- Bawaslu tak boleh lengah.

Petugas kebersihan ditambah, wisatawan diminta bijak.
-- Artinya, jangan buang sampah sembarangan.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.